



The Quality of Human Resources Among Sidokepong Village Officials in Managing SID

Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa Sidokepong dalam Mengelola SID

Isnaini Rodiyah*, Lailul Mursyidah, Ahmad Riyadh Umar Balahmar, Eni Rustianingsih, Griselda Amanda Archiey Putri

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

General Background: The digitalization of village government through *Sistem Informasi Desa* (SID) has not been accompanied by evenly distributed human resource (HR) readiness among village officials. **Specific Background:** In Sidoarjo Regency, 174 of 209 villages have implemented SID, but only 98 operate the system effectively. In Sidokepong Village, the OpenSID-based SID has been implemented since 2021, yet its management still relies on a single operator. **Knowledge gap:** Despite the growing implementation of *Sistem Informasi Desa* (SID), limited research has examined how village officials' competence, knowledge, work attitudes, and productivity collectively influence the effective and sustainable management of these systems, particularly in villages that rely on a single operator. **Aims:** This study aims to analyze the quality of human resources among village officials in Sidokepong Village, Buduran District, Sidoarjo Regency, in managing SID based on four dimensions: competence, knowledge, work attitude, and productivity. **Result:** The quality of human resources among village officials is uneven and remains limited to basic operational functions. The use of advanced SID features is limited, knowledge of data security and updating remains low, passive resistance and dependence on a single operator persist, and collective digital productivity has not yet been established. **Novelty:** This study highlights the distribution of HR capacity as a key factor in the successful implementation of SID, particularly through the relationship between officials' competencies, dependence on a single operator, and collective digital productivity. **Implication:** Optimizing SID requires continuous training, the distribution of competencies among village officials, and the strengthening of a digital work culture to improve technology utilization and reduce dependence on a single operator.

Keywords: human resource capacity, village officials, digital governance

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sulikah Asmorowati

Reviewed by:

Lely Indah Mindarti and RD Kusyeni

*Correspondence:

Isnaini Rodiyah

isnainirodiyah@umsida.ac.id

Received: September 14, 2026

Accepted: September 28, 2026

Published: October 18, 2026

Citation:

Rodiyah, I., Mursyidah, L.,
Balahmar, A.R. U.,
Rustianingsih, E., & Putri, G.
A. A. (2026). *The Quality of
Human Resources among
Sidokepong Village Officials in
Managing Sistem Informasi
Desa.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 14:2.
doi: 10.21070/jkmp.v14i2.2130

PENDAHULUAN

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur tidak lagi diukur semata dari kemampuan administratif konvensional, melainkan juga dari kesiapan beradaptasi dengan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung reformasi birokrasi digital (Gadzali et al., 2023). Di tingkat desa, transformasi tersebut diwujudkan melalui Sistem Informasi Desa (SID), yaitu instrumen digital untuk mengelola data kependudukan, keuangan, aset, dan kegiatan pembangunan desa (Mardinata et al., 2023). Kebijakan ini berakar pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk perencanaan pembangunan berbasis data, serta terhubung dengan agenda Smart Village dan SDGs Desa (Almadani et al., 2024). Namun, cakupan implementasi tidak berbanding lurus dengan efektivitasnya. Secara nasional, sekitar 45% dari 74.961 desa telah mengimplementasikan SID pada 2020–2024, tetapi banyak di antaranya baru menjalankan fungsi dasar (Dana et al., 2025). Di Kabupaten Sidoarjo, 174 dari 209 desa (82%) telah mengimplementasikan SID, tetapi hanya 98 desa (47%) yang mengoperasikannya secara efektif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tantangan utama digitalisasi desa tidak lagi terletak pada ketersediaan infrastruktur, melainkan pada kualitas SDM yang mengelolanya.

Sejumlah studi menegaskan peran sentral faktor manusia dalam digitalisasi pemerintahan. Pengembangan kapasitas SDM aparatur terbukti menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa (Rodiyah et al., 2021), sedangkan kompetensi SDM berkontribusi terhadap akurasi dan transparansi laporan keuangan berbasis sistem digital (Ifrah et al., 2025; Sudarlan et al., 2024). Rendahnya keterampilan aparatur menjadi hambatan mendasar pelayanan berbasis SID (Briyadi et al., 2025), literasi digital menjadi kunci pengelolaan data desa yang akurat (Razak et al., 2025), dan keberhasilan transformasi digital desa ditentukan pula oleh kesiapan SDM serta budaya organisasi, bukan semata kecanggihan teknologi (Wahyiah, 2025). Di Sidoarjo, akses internet yang belum merata, kualitas SDM yang belum memadai, dan tidak adanya aparatur yang khusus ditugaskan mengelola sistem terbukti menghambat efektivitas SID (Romadhoni & Rodiyah, 2025). Namun, sebagian besar kajian tersebut mengukur pengaruh SDM secara kuantitatif, berfokus pada aspek teknis sistem, atau berbentuk program pengabdian (Anshari et al., 2025; Yunas et al., 2024), sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kapasitas SDM terdistribusi di dalam organisasi pemerintah desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kualitatif keempat dimensi kualitas SDM secara terpadu pada desa yang telah lama menerapkan SID dan memiliki portal publik dengan kunjungan tinggi, tetapi pengelolaannya masih bertumpu pada operator tunggal. Kontribusi spesifiknya adalah pemetaan pola ketergantungan pada operator tunggal dan resistensi pasif sebagai bentuk kesenjangan kapasitas SDM yang tidak tampak dari indikator adopsi teknologi, disertai rekomendasi penguatan kapasitas yang dapat diterapkan pada desa-desa serupa di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan teori kualitas SDM Hasibuan sebagai kerangka analisis utama. Kualitas SDM dipahami sebagai cerminan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas secara efektif dan berkontribusi pada tujuan organisasi, yang tecermin dalam empat dimensi: kompetensi (keterampilan kerja sesuai standar tugas), pengetahuan (pemahaman konseptual dan teknis yang mendasari pekerjaan), sikap kerja (orientasi mental dan perilaku dalam merespons perubahan, termasuk penerimaan atau resistensi terhadap teknologi), dan produktivitas (perbandingan hasil kerja dengan sumber daya yang digunakan). Keempat dimensi ini relevan karena SID bukan sekadar aplikasi teknis, melainkan instrumen tata kelola yang efektivitasnya bergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas SDM aparatur desa dalam pengelolaan SID di Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kualitas SDM dalam pengelolaan SID merupakan fenomena

sosial yang kontekstual sehingga lebih tepat dipahami melalui pengalaman dan praktik kerja aparatur dibandingkan pengukuran kuantitatif (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pada bulan-bulan 2026. Lokasi dipilih karena desa ini telah menerapkan SID sejak 2021 sebagai bagian dari program Desa Digital Sidoarjo, tetapi berdasarkan observasi awal pemanfaatannya belum merata di antara aparatur. Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi kualitas SDM, yaitu (a) kompetensi teknis mengoperasikan SID; (b) pengetahuan konseptual dan teknis tentang fungsi SID; (c) sikap kerja dan motivasi dalam merespons digitalisasi; serta (d) produktivitas dalam memanfaatkan SID untuk pelayanan publik desa.

Informan ditentukan secara purposive dengan kriteria terlibat langsung dalam pengelolaan atau penggunaan SID, memahami kebijakan digitalisasi desa, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka (Napitupulu et al., 2026). Informan berjumlah lima orang, yaitu Kepala Desa (S1) sebagai penentu kebijakan digitalisasi, Sekretaris Desa (S1) sebagai koordinator administrasi dan pelatihan, operator SID sebagai pengelola teknis input dan pemeliharaan data, serta Kepala Seksi Pelayanan (SMA) dan Kepala Seksi Pemerintahan (SMA) sebagai pengguna SID dalam pelayanan administrasi. Komposisi ini mewakili rantai pengelolaan SID dari tingkat kebijakan, koordinasi, teknis, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka di Kantor Desa Sidokepong. Observasi dilakukan terhadap proses kerja aparatur saat menggunakan SID dalam pelayanan serta kondisi infrastruktur pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet. Dokumentasi mencakup arsip desa, data aparatur, statistik kunjungan dari dasbor admin laman desa, dan tampilan laman OpenSID Desa Sidokepong. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memunculkan kategori temuan baru pada keempat dimensi (kejenuhan data) serta telah terkonfirmasi melalui triangulasi.

Analisis data menggunakan model interaktif yang berlangsung sejak pengumpulan data (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pertama, reduksi data dilakukan dengan membaca transkrip secara berulang, memberi kode pada pernyataan yang relevan, lalu mengelompokkannya ke dalam empat dimensi kualitas SDM. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara terpilih, tabel, dan gambar agar pola keterkaitan antardimensi mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antarinforman, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidokepong menerapkan SID berbasis OpenSID sejak 2021 sebagai bagian dari program Desa Digital Sidoarjo untuk mencatat data kependudukan, keuangan desa, dan pelayanan surat-menyurat (Setiawan & Supriyanti, 2024). Laman resmi desa menampilkan informasi kependudukan, berita desa, dan perkembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dapat diakses publik (Gambar 1). Jumlah kunjungan laman meningkat dari 12.387 pada 2021 menjadi 209.335 pada 2024, kemudian turun menjadi 152.252 pada 2025, dengan total 478.755 kunjungan (Tabel 1). Data ini menunjukkan bahwa kanal digital desa telah dimanfaatkan masyarakat secara luas. Namun, tingginya pemanfaatan di sisi masyarakat belum diimbangi kesiapan yang merata di sisi aparatur pengelola.



Gambar 1. Tampilan Laman OpenSID Desa Sidokepong

Sumber: <https://sidokepong-buduran.desa.id/>**Tabel 1.** Perkembangan Jumlah Pengunjung Laman Desa Sidokepong Tahun 2021–2025

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2021	12.387
2	2022	28.742
3	2023	76.039
4	2024	209.335
5	2025	152.252
Total		478.755

Sumber: Dashboard Admin Website Desa, diolah peneliti 2026

Pemerintah Desa Sidokepong didukung oleh 12 aparatur, dua di antaranya berpendidikan S1 dan sepuluh lainnya berpendidikan SMA (Tabel 2). Tingkat pendidikan tidak secara langsung menentukan kemampuan digital, tetapi menjadi indikator awal kapasitas SDM yang tersedia. Secara umum, penelitian ini menghasilkan empat temuan utama. Kompetensi pengelolaan SID terpusat pada operator tunggal, pengetahuan aparatur terbatas pada fungsi dasar, sikap kerja positif tetapi disertai resistensi pasif, dan produktivitas digital masih terbatas pada layanan administratif dasar. Keempat temuan tersebut diuraikan pada bagian berikut:

Tabel 2. Aparatur Pemerintah Desa Sidokepong

No.	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	Arintono, S.E.	S1
2	Sekretaris Desa	Samsul Haryadi, S.P.	S1
3	Kaur Tata Usaha dan Umum	Dyah Ari Cendani	SMA
4	Kaur Keuangan	Irma Kurnia Suhartiningrum	SMA
5	Kaur Perencanaan	Fikri Arie Utomo	SMA
6	Kasi Pelayanan	Heri Siswoyo	SMA
7	Kasi Pemerintahan	Achmad Saiful	SMA
8	Kasi Kesejahteraan	Moh Mushlih	SMA
9	Kepala Dusun	Dimas Ardi Pranata	SMA
10	Kepala Dusun	Yulianto	SMA
11	Kepala Dusun	Achmad Efendi	SMA
12	Kepala Dusun	Maulidya Firdayanti	SMA

Sumber: Website Resmi Desa Sidokepong, Diolah Peneliti 2026

Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan SID

Kompetensi aparatur dalam mengelola SID belum merata dan masih terbatas pada fungsi operasional dasar. Operator SID mampu menginput data kependudukan, mencetak surat, dan memperbarui sebagian basis data, tetapi fitur lanjutan seperti laporan otomatis, analisis statistik desa, integrasi dengan aplikasi pemerintah daerah, dan pengarsipan digital belum dijalankan karena belum pernah diajarkan secara mendalam. Aparatur lain cenderung menyerahkan urusan sistem kepada operator karena lebih terbiasa bekerja manual dan khawatir melakukan kesalahan input. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa aparatur Desa Sidokepong telah memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet yang mendukung pelaksanaan pekerjaan berbasis digital. Namun, kemampuan aparatur dalam mengoperasikan Sistem Informasi Desa (SID) masih belum merata. Pelatihan SID telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum rutin dan masih terbatas pada peserta tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aparatur belum terbiasa menggunakan SID secara mandiri sehingga masih bergantung pada bantuan operator dalam menjalankan sistem.

Pernyataan tersebut, yang juga dikonfirmasi oleh Kepala Desa dan hasil observasi, menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat tidak otomatis menghasilkan kompetensi. Dalam kerangka Hasibuan, kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat dibuktikan melalui hasil kerja sesuai standar tugas (Purnama et al., 2023); penguasaan yang berhenti pada fungsi input menandakan kompetensi aparatur belum menjangkau pengembangan sistem dan inovasi layanan. Temuan ini sejalan dengan Rodiyah et al. (2021) yang menegaskan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur menentukan keberhasilan pemerintahan desa, serta Romadhoni & Rodiyah (2025) yang menemukan ketiadaan aparatur khusus sebagai penghambat efektivitas SID. Bedanya, di Desa Sidokepong persoalannya bukan ketiadaan pengelola, melainkan pemusatan kompetensi pada satu orang sehingga terbentuk pola *single fighter bureaucracy*.

Bagi tata kelola pemerintahan desa, pola tersebut menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, penundaan layanan ketika operator berhalangan, dan kerentanan keberlanjutan sistem ketika terjadi pergantian aparatur. Oleh karena itu, penguatan kompetensi perlu diarahkan pada pelatihan berjenjang bagi seluruh perangkat dan pembagian peran pengelolaan SID yang jelas, bukan hanya pada peningkatan kemampuan operator.

Pengetahuan Aparatur tentang Teknologi Informasi dan SID

Pengetahuan aparatur mengenai fungsi dasar SID, manfaatnya bagi pelayanan, dan prosedur penginputan data sudah memadai. Namun, pengetahuan tentang keamanan data, pencadangan (*backup*) basis data, standardisasi data, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan masih rendah. Sebagian aparatur hanya pernah mengikuti satu kali pelatihan dengan materi yang sangat mendasar sehingga pengetahuannya tidak berkembang seiring pembaruan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan menyatakan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sidokepong masih berfokus pada kegiatan administrasi dan pendataan masyarakat. Meskipun SID menyediakan berbagai fitur pendukung lainnya, pemanfaatannya belum optimal karena belum semua aparatur desa memahami fungsi dan cara pengoperasiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan SID masih terbatas pada kebutuhan dasar, seperti pengelolaan data kependudukan dan pelayanan administrasi, sementara fitur-fitur lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan konseptual membuat aparatur memandang SID sebatas alat bantu administrasi, bukan sistem pendukung tata kelola yang juga berfungsi sebagai basis perencanaan, pelaporan keuangan, dan transparansi informasi. Fitur yang telah berjalan, misalnya Kartu Data Administrasi (KDA) untuk memutakhirkan data dan mendata warga yang belum terdaftar (Gambar 2), masih dimanfaatkan sebatas pencatatan. Menurut Hasibuan, pengetahuan merupakan dasar agar pekerjaan dijalankan secara benar dan efisien; tanpa pemahaman mengapa data perlu distandardisasi dan diamankan, keterampilan teknis tidak berkembang menjadi pemanfaatan strategis. Temuan ini konsisten dengan Razak et al (2025) yang menempatkan literasi digital

sebagai penentu akurasi dan keberlanjutan pengelolaan data desa, serta Anshari et al. (2025) yang menekankan pelatihan berkelanjutan sebagai strategi utama peningkatan literasi digital aparatur. Implikasinya, materi pelatihan perlu bergeser dari sekadar cara mengoperasikan aplikasi menuju pemahaman tata kelola data desa.



Gambar 2. Kartu Data Administrasi (KDA) Desa Sidokepong
Sumber: Website Resmi Desa Sidokepong

Sikap Kerja dan Motivasi Aparatur Desa terhadap Penggunaan SID

Aparatur memiliki sikap positif terhadap SID dan pimpinan desa berkomitmen mendorong penggunaannya. Kepala Desa menyatakan bahwa SID mempercepat pelayanan dan memudahkan pengelolaan data, tetapi kemampuan setiap perangkat berbeda sehingga masih diperlukan pendampingan agar semua dapat menggunakannya dengan percaya diri. Di tingkat pelaksana, sikap positif tersebut belum disertai rasa percaya diri, sebagaimana dituturkan Kepala Seksi Pelayanan yakni penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) telah membantu aparatur Desa Sidokepong dalam melaksanakan pelayanan administrasi. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap beberapa fitur sistem menyebabkan aparatur masih bergantung pada bantuan operator. Kekhawatiran melakukan kesalahan saat memasukkan data juga membuat sebagian aparatur kurang percaya diri untuk mengoperasikan SID secara mandiri. Akibatnya, pekerjaan yang berkaitan dengan SID terkadang tertunda ketika operator tidak berada di tempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur yang cenderung berhati-hati belum sepenuhnya diimbangi dengan kepercayaan diri dan kemandirian dalam memanfaatkan teknologi digital.

Temuan ini menunjukkan resistensi yang bersifat pasif, bukan penolakan terbuka: aparatur menerima dan mengakui manfaat SID, tetapi jarang membuka aplikasi secara mandiri, menunda pekerjaan ketika operator tidak hadir, dan minim inisiatif mengikuti pelatihan lanjutan. Aparatur yang lebih senior juga cenderung lebih lambat beradaptasi dibandingkan aparatur muda. Dalam teori Hasibuan, sikap kerja mencerminkan orientasi mental aparatur dalam merespons perubahan; di Desa Sidokepong, niat untuk berubah sudah ada, tetapi kemampuan belum mengikutinya. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa resistensi terhadap inovasi muncul dari kurangnya pemahaman, kecemasan terhadap kesalahan, dan minimnya dukungan lingkungan kerja (Zebua et al., 2024), serta bahwa resistensi sosial merupakan hambatan struktural transformasi digital pemerintahan (Suhartono et al., 2025). Implikasinya, pembentukan budaya kerja digital perlu disertai pendampingan praktik dan panduan kerja yang memberi rasa aman dari risiko kesalahan input agar motivasi positif tidak berhenti pada tataran wacana.

Produktivitas Aparatur dalam Pengelolaan SID

Produktivitas aparatur dalam pengelolaan SID ditinjau dari kecepatan pelayanan, akurasi data, pemutakhiran basis data, dokumentasi administrasi, dan ragam layanan digital. SID telah dimanfaatkan untuk surat pengantar, surat domisili, surat keterangan usaha, dan pencatatan kependudukan, tetapi belum untuk perencanaan pembangunan, monitoring program, publikasi informasi rutin, maupun pengelolaan keuangan digital. Akurasi data kependudukan relatif baik, tetapi pemutakhiran basis data belum berkala dan kecepatan pelayanan masih bergantung pada kehadiran operator. Kepala Seksi Pemerintahan menjelaskan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) membantu aparatur Desa Sidokepong dalam mengakses data kependudukan dan memperoleh informasi masyarakat secara lebih cepat ketika memberikan pelayanan administrasi. Namun, efektivitas pemanfaatan data tersebut bergantung pada pembaruan informasi secara berkala, mengingat jumlah penduduk dan kondisi masyarakat dapat mengalami perubahan. Apabila pemutakhiran data tidak dilakukan secara konsisten, informasi yang tersimpan dalam sistem berisiko tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan akurasi dan kemutakhiran data menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Seksi Pelayanan yang menyebut bahwa pelayanan terkadang harus menunggu apabila operator tidak berada di kantor. Gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik juga membuat aparatur kembali ke metode manual sehingga SID masih berfungsi sebagai sistem alternatif, bukan sistem utama administrasi desa. Dalam kerangka Hasibuan, produktivitas mencerminkan perbandingan hasil dengan sumber daya; tersedianya perangkat dan data belum menghasilkan keluaran optimal karena produktivitas digital belum terbentuk sebagai kemampuan kolektif organisasi. Temuan ini sejalan dengan Idham (2025) mengenai keterbatasan infrastruktur desa, Safitri & Adnan (2024) yang menunjukkan bahwa manfaat SID tidak dirasakan optimal meskipun sistem telah tersedia, serta Alfianto & Nugroho (2024) yang membuktikan bahwa pengembangan kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai.

Di sisi lain, pemerintah desa mulai memperluas fungsi SID melalui platform Sidoblonjo untuk mendata UMKM warga secara terintegrasi bersama pengurus TP-PKK (Gambar 3). Data UMKM dikelompokkan menurut jenis usaha untuk memudahkan verifikasi program bantuan, mengidentifikasi UMKM yang siap naik kelas, dan membantu pengurusan legalitas usaha. Inisiatif ini menunjukkan bahwa digitalisasi desa mulai menysar pemberdayaan ekonomi, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kapasitas SDM yang sama. Bagi tata kelola desa, peningkatan produktivitas menuntut jadwal pemutakhiran data yang baku, pembagian piket layanan berbasis SID, dan dukungan infrastruktur yang andal.



Gambar 3. Tampilan Akses Laman Sidoblonjo oleh Perangkat Desa Sidokepong
Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Sintesis Temuan dan Implikasi

Keempat dimensi saling berkaitan: kompetensi yang terpusat pada operator berakar pada pengetahuan yang terbatas, keterbatasan tersebut menimbulkan resistensi pasif, dan ketiganya membatasi produktivitas digital. Faktor pendukung yang tersedia meliputi komitmen pimpinan desa, infrastruktur dasar berupa komputer dan jaringan internet, motivasi aparatur terhadap manfaat SID, serta payung kebijakan SPBE dan Desa Digital Sidoarjo. Faktor penghambatnya adalah literasi digital yang rendah, pelatihan yang tidak rutin dan tidak merata, ketergantungan pada operator tunggal, infrastruktur yang belum stabil, dan budaya kerja manual yang telah mengakar. Temuan ini memperkuat teori Hasibuan bahwa keberhasilan sistem organisasi, termasuk sistem digital pemerintahan desa, ditentukan oleh kualitas SDM pengelolanya, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan SPBE di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari kesiapan manusia. Secara praktis, Pemerintah Desa Sidokepong dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu merancang pelatihan digital yang terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh aparatur, bukan hanya operator SID (Yunas et al., 2024).

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian dilakukan pada satu desa dengan lima informan sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi secara langsung, meskipun polanya selaras dengan studi di desa lain. Penelitian ini juga belum mengkaji sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, padahal masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas transparansi informasi desa (Mayyora & Wanusmawatie, 2026), sehingga penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi sisi permintaan (*demand side*) layanan digital desa.

KESIMPULAN

Kualitas SDM aparatur Desa Sidokepong dalam pengelolaan SID belum merata dan masih terbatas pada fungsi operasional dasar. Pada dimensi kompetensi, kemampuan mengoperasikan SID terpusat pada operator tunggal, sedangkan aparatur lain bergantung padanya. Pada dimensi pengetahuan, aparatur memahami fungsi dasar SID, tetapi belum menguasai aspek keamanan, pemutakhiran, standarisasi, dan pemanfaatan data untuk perencanaan. Pada dimensi sikap kerja, aparatur menerima SID secara positif, tetapi masih menunjukkan resistensi pasif akibat rendahnya kepercayaan diri. Pada dimensi produktivitas, SID telah mempercepat layanan administrasi dasar, tetapi belum menjadi sistem utama tata kelola desa karena pemutakhiran data tidak berkala dan layanan bergantung pada kehadiran operator. Dengan demikian, keberhasilan SID lebih ditentukan oleh pemerataan kapasitas SDM daripada ketersediaan teknologi, sehingga pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi seluruh perangkat, membentuk tim pengelola SID dengan pembagian peran yang jelas, dan menetapkan jadwal pemutakhiran data secara berkala.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil karya sendiri dan, sepanjang pengetahuan penulis, tidak memuat materi yang sebelumnya telah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, maupun bagian substansial dari materi yang telah diterima untuk diterbitkan dalam publikasi lain, kecuali jika sumbernya telah diakui dan dicantumkan secara jelas dalam artikel ini. Setiap kontribusi yang diberikan oleh pihak lain dalam penelitian ini, termasuk mereka yang bekerja sama dengan penulis, telah diakui secara eksplisit dalam artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sidokepong. Penulis juga mengakui penggunaan ChatGPT (OpenAI) untuk membantu penyuntingan bahasa dan kejelasan naskah. Seluruh keluaran AI telah diverifikasi, dan penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan serta integritas karya yang dipublikasikan.

REFERENCES

- Alfianto, A., & Nugroho, M. T. (2024). Pengaruh Pengembangan Kompetensi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 75–94. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i4.1180>
- Almadani, M., Cahyani, A. A. D., & Khadafi, M. (2024). The Influences of Electronic-Based Government System (SPBE) Implementation on Performance Accountability in the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 12(1), 96–132. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v12i1.4057>
- Anshari, K., Hernany, D. H., Puspita, A., Hafi, M. A., Inayah, R., Hafi, M., Masrifah, & Rahadian, A. (2025). Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Transparansi Anggaran dan Pelayanan Publik di Setda Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10169–10173. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3633>
- Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart Desa, Layanan Cerdas : Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 143–163. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.410>
- Dana, G., Yuniari, N., Raharja, I., Bhaskara, I., Darma, I., & Kumara, I. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja. *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2270>
- Gadzali, S. S., Gazalin, J., Sutrisno, S., Prasetya, Y. B., & Almaududi Ausat, A. M. (2023). Human Resource Management Strategy in Organisational Digital Transformation. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 760–770. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12508>
- Idham, I. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Sebagai Upaya Optimalisasi Layanan Administrasi Publik Di Kantor Desa Ropang. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 6(4), 1215–1222. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v6i4.2511>
- Ifrah, M., Elviani, S., & Andri, S. (2025). Pengaruh TI dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Pengendalian Internal. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 5(1), 219–232. <https://doi.org/10.46576/wjs.v5i1.6867>
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Mayyora, R., & Wanumawatie, I. (2026). Digitalisasi Desa Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan: Kajian Literatur Review Dengan Pendekatan Society-Centered. Governance. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 12(1), 479–490. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.482>
- Napitupulu, M. S., Selwendri, S., & Siregar, O. M. (2026). Pengaruh Pemanfaatan Platform Food Delivery Online dan User Review terhadap Penjualan pada UMKM Rumah Makan Bakmi Saudara di Kota Medan. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(4), 1751–1764. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3094>
- Purnama, A., Bintang, N. D., Pratiwi, T., Al-Fatih, M., Winata, C., & Aswaruddin. (2023). Kompetensi Dan Employability Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 224–234. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i1.1384>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Razak, M. R. R., Nonci, N., Lubis, S., Dayadi, & Khaerunnisa, M. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 411–422. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4947>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 32–41. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5631>
- Romadhoni, M. N., & Rodiyah, I. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Larangan. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 18–34. <https://doi.org/10.30656/sawala.v13i1.9800>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Safitri, D. D., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Layanan Mandiri Pada Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.198>
- Setiawan, A. B., & Supriyanti, W. (2024). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12507–12521. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15888>
- Sudarlan, S., Surahman, Affan, N., Maghfirah Vidhiyanty, P., & Hasanah, L. (2024). Enhancing financial reporting quality in village-owned enterprises: The role of organizational competencies. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 83–97. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.08](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.08)
- Suhartono, B., Rivai, F. H., Wibowo, E. K., & Rasyid, A. C. (2025). Implementasi e-Government dalam Pelayanan Publik di Unit Layanan Administrasi pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 7(2), 189–204. <https://doi.org/10.32834/jsda.v7i2.972>
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>
- Yunas, N. S., Susanto, A. H., & Kuswandro, W. E. (2024). Penguatan Kapasitas Digital Leadership Bagi Aparatur Pemerintah Desa. *Surya Abdimas*, 8(3), 376–385. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.4887>

Zebua, I., Waruwu, M. H., Harefa, I., & Mendrofa, S. A. (2024). Analisis Strategi Komunikasi Dalam Mengurangi Resistensi Pegawai Pada Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli. *MARGIN ECO*, 8(1), 54–66. <https://doi.org/10.32764/margin.v8i1.4559>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2026 Isnaini Rodiyah, Lailul Mursyidah, Ahmad Riyadh Umar Balahmar, Eni Rustianingsih, Griselda Amanda Archiey Putri. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.